

**THE EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM AND
INTERNAL CONTROL SYSTEM ON FINANCIAL PERFORMANCE OF
MAKASSAR CITY GOVERNMENT**

**Abdul Rival
Marwah Yusuf^{1,2}
Sufiati**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya

Received 19 May 2022

Revised 31 July 2022

Accepted 20 October 2022

¹E-mail: marwah_yusuf@yahoo.com | ²Correspondence Author

ABSTRACT

Purpose – This study aims to determine the effect of the regional financial accounting system and internal control system on the financial performance of the Makassar city government.

Design/methodology/approach – Methods of data analysis using multiple linear regression analysis method.

Findings – The results showed that the regional financial accounting system and internal control system simultaneously had a positive and significant effect on the financial performance of the Makassar city government, the regional financial accounting system partially had a positive and significant effect on the Makassar city government's financial performance, and the internal control system partially had a positive effect. and significant to the financial performance of the Makassar city government.

Originality – The population in this study were all regional organizations totaling 52 OPD.

Keywords: Regional Financial Accounting System, Internal Control System, Government Financial Performance

Paper Type Research Result



Contemporary
Journal on Business
and Accounting
© Institut
Transparansi dan
Akuntabilitas Publik
(INSPIRING)

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

Abdul Rival

Marwah Yusuf^{1,2}

Sufiati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya

¹E-mail: marwah_yusuf@yahoo.com | ²Correspondence Author

ABSTRAK

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Makassar.

Desain/metodologi/pendekatan – Metode analisis data menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Makassar, sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Makassar, dan sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Makassar.

Originalitas – . Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah yang berjumlah 52 OPD.

Kata-kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Kinerja Keuangan Pemerintah

Jenis Artikel *Research Result*

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu sistem distribusi tata kelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun (2022) Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

Otonomi daerah merupakan Hak, Wewenang, dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014). Dalam rangka untuk mewujudkan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam menjalankan otonomi daerah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana konsep ini menuntut adanya pengembangan kinerja institusi baik pemerintah, bisnis dan masyarakat secara komprehensif pada semua tingkatan (Satria, 2019) . Hal ini harus didukung dengan adanya akuntabilitas publik yang merupakan syarat terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun (2020) tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer.

Sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang akuntabel dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun (2010) tentang standar akuntansi pemerintahan maka akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas sehingga dapat menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan

bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada sistem pengendalian internal pemerintah (Epifani Yusta Meyendri Bong, 2021).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat 18 dari 541 (3%) LKPD yang mengalami penurunan opini. Salah satunya LKPD pemerintah Kota Makassar yang sebelumnya 10 tahun berturut-turut mendapat opini WTP tetapi pada tahun 2020 mendapat opini WDP. Hal ini terjadi karena laporan keuangan Pemerintah Daerah belum menyajikan LKPD yang sesuai dengan SAP seperti akun yang disajikan tidak didukung dengan bukti yang cukup, kecukupan pengungkapan laporan keuangan belum menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya, dan lemahnya sistem pengendalian internal seperti pencatatan belum dilakukan dengan akurat, serta ketidakpatuhan pada perundang-undangan (<https://www.bpk.go.id/ihs> 2021).

Terkait hasil temuan BPK atas LKPD pemerintah kota Makassar yang menunjukkan kinerja keuangan pemerintah kota Makassar Tahun anggaran 2020 masih dinilai belum maksimal. Ini menjadi salah satu hal penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif, dibutuhkan tahapan yang panjang dan sistem yang mengaturnya, yaitu sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal. Apabila dalam pengelolaan keuangan daerah telah diterapkan sistem akuntansi keuangan daerah dengan baik, maka sistem pengendalian internal berjalan secara efektif sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, yang menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nuraini Ismail dkk, (2021). Pada penelitian ini menggunakan variabel Independen yaitu sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel dependen sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan teknologi informasi. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan di pemerintah kota Makassar sedangkan pada penelitian sebelumnya di lakukan di pemerintah kabupaten Ngekeo.

Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "Pengaruh Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar”

LANDASAN TEORI

Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja Keuangan

Peraturan Pemerintah No.8 Tahun (2008) menyatakan kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Menurut Indra Bastian (2015:274) Kinerja merupakan gambaran tentang pencapaian suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi

Fahmi (2012:2) menyatakan bahwa Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan atau organisasi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, sedangkan Menurut Wiratna Sujarweni (2017:71) menyatakan bahwa Kinerja keuangan merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama.

Kinerja Keuangan Pemerintah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun (2020) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kinerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan pengukur keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuannya, dan untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan pelayanan yang dicapai.

Menurut Abdul Halim (2012:24) Kinerja keuangan pemerintah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Sedangkan menurut Mahmudi (2016:89) kinerja keuangan pemerintah daerah tercermin dalam laporan keuangan neraca, realisasi anggaran, dan laporan arus kas yang kemudian dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan dalam bentuk angka-angka sebagai dasar pengambilan keputusan.

Menurut Mardiasmo (2018:121) menyatakan bahwa Pengukuran kinerja pada sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu:

- 1) Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
- 2) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah

Adapun indikator dari kinerja keuangan pemerintah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun (2020) tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

- 1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
- 2) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
- 3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah
- 4) Penyerapan anggaran
- 5) Kondisi keuangan daerah
- 6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun (2020) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) didefinisikan sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer.

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:6) sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Mahmudi (2016:19) yang dimaksud dengan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah adalah Kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalam setiap subsistem tersebut terdapat tahap-tahap, prosedur, perangkat, peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data

keuangan, kemudian mengelola data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun internal pemerintah daerah

Menurut Novtania Mokoginta dkk (2017) sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar, dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak internal dan eksternal pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun (2020) tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah indikator sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintah.

Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Karena sistem akuntansi pemerintah merupakan pedoman bagi akuntansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.

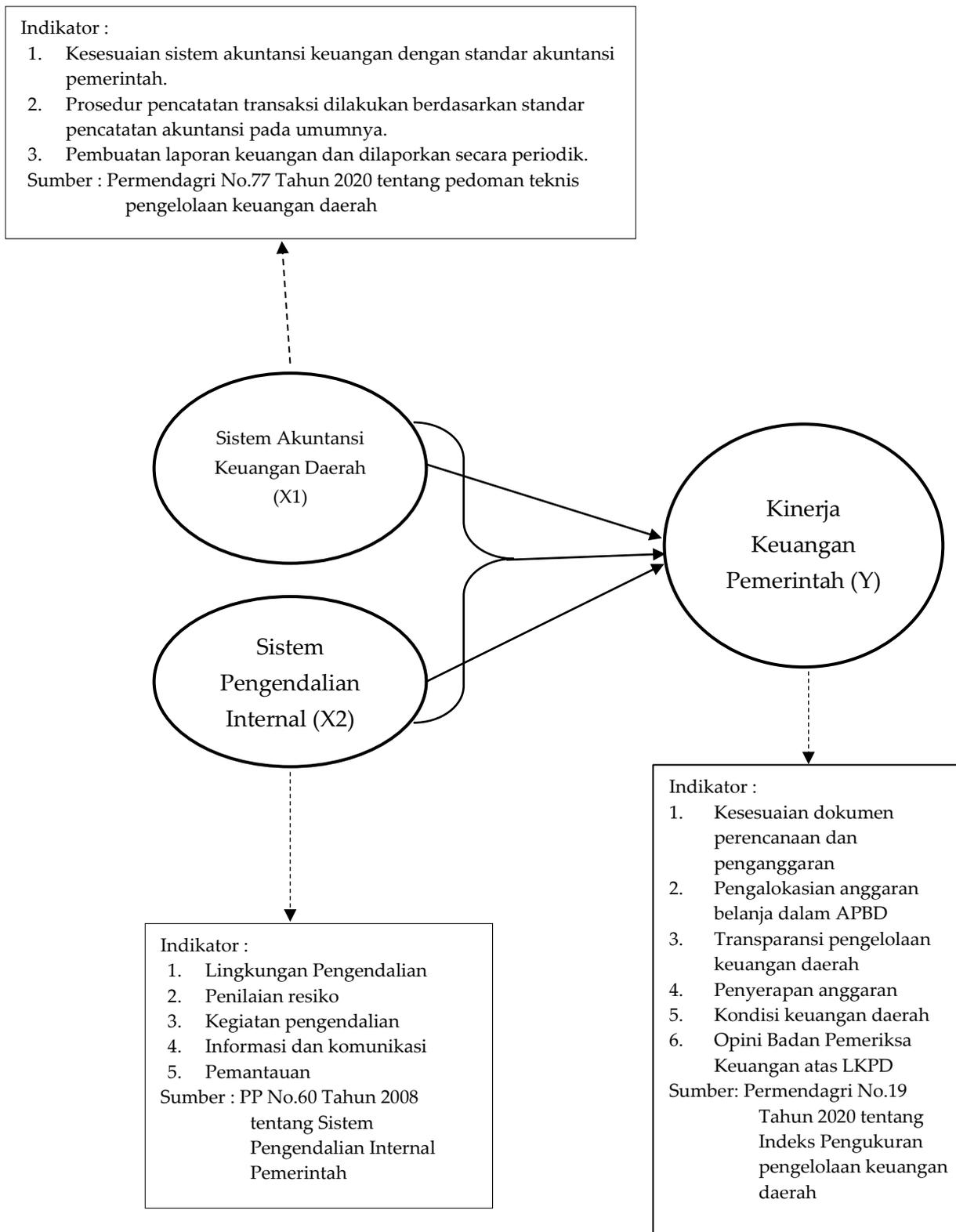
- 2) Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya.

Prosedur Pencatatan akuntansi pemerintahan daerah harus didasarkan pada kesesuaian dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum

- 3) Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik.

Laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah. laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik untuk mengukur kinerja secara periodik dan untuk kepentingan dalam pengambilan keputusan. Sehingga, suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai adalah pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Kerangka Pemikiran Teoretis



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka konseptual telah dikemukakan maka Hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : Sistem akuntansi keuangan daerah dan Sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Makassar**
- H2 : Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Makassar**
- H3 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Makassar**

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif kausal. Menurut Sugiyono (2019:65) penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih.

Menurut Sugiyono (2019:16) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada metode ilmiah/scientific, metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

Populasi dan Sampel

Populasi

Menurut Sugiyono (2019:126) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah pemerintah kota Makassar yakni berjumlah 52 organisasi perangkat daerah

Sampel

Menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability* dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2019:133) teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun Pertimbangan dalam penelitian ini adalah dikarenakan mampu memberikan data yang terkait dengan penelitian, adanya keterbatasan waktu dan jarak antar organisasi perangkat daerah cukup jauh sehingga sampel dalam penelitian ini adalah organisasi perangkat daerah yang berbentuk dinas sebanyak 25 dinas. setiap dinas diambil sebagai responden 2 orang yakni 1 Kepala Bagian Keuangan dan 1 Staf Bagian Keuangan

Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditentukan 25 dinas dan 2 responden dari tiap Dinas dengan total 50 responden. Hal ini dapat dirincikan dalam tabel dibawah yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Sampel Penelitian

No.	Nama Dinas	Jumlah
1.	Dinas Kearsipan	2
2.	Dinas Kebudayaan	2
3.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2
4.	Dinas Kesehatan	2
5.	Dinas ketahanan Pangan	2
6.	Dinas Ketenagakerjaan	2
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2
8.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2
9.	Dinas Lingkungan Hidup	2
10.	Dinas Pariwisata	2
11.	Dinas Pekerjaan Umum	2
12.	Dinas Pemadam Kebakaran	2
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan	2
14.	Dinas Pemuda dan Olahraga	2
15.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	2
16.	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	2
17.	Dinas Pendidikan	2
18.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	2
19.	Dinas Perdagangan	2
20.	Dinas Perhubungan	2
21.	Dinas Perikanan dan Pertanian	2
22.	Dinas Perpustakaan	2
23.	Dinas Pertanahan	2
24.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2

25. Dinas Sosial	2
Total	50

Sumber : <https://www.makassar.go.id>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rincian Penyebaran Kuesioner dan Identitas Responden

Rincian Penyebaran Kuesioner

Kuesioner dalam penelitian ini disebar kepada 50 responden yang tersebar di 25 organisasi perangkat daerah yang berbentuk dinas. Berikut ini adalah tabel rincian penyebaran kuesioner

Tabel 2. Rincian Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Jumlah kuesioner yang disebar	50	100%
2.	Jumlah kuesioner yang kembali	46	92%
3.	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	4	8%
4.	Jumlah kuesioner yang bisa diolah	46	100%

Sumber : Data Primer (diolah, 2022)

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat dijelaskan bahwa, kuesioner yang disebar sejumlah 50 kuesioner, kuesioner yang kembali sebanyak 46 kuesioner dengan demikian, tingkat pengembalian yang diperoleh adalah sebesar 92%, maka jumlah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 46 kuesioner dan dapat diolah dengan baik.

Identitas Responden

Adapun identitas responden dijelaskan melalui 5 klasifikasi karakteristik identitas responden yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, Masa Kerja. Untuk menjelaskan identitas responden yang dimaksud maka disajikan tabel mengenai responden yang dijelaskan sebagai berikut;

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

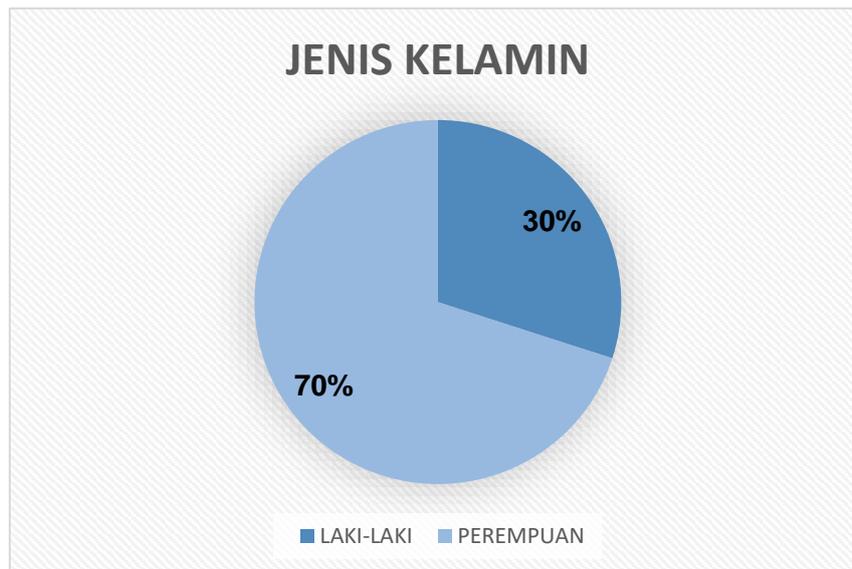
Berikut ini adalah tabel identitas responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 3. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	F	%
1	Laki – Laki	14	30%
2	Perempuan	32	70%
Jumlah		46	100%

Sumber : Data primer diolah 2022

Berdasarkan pada tabel 3 menunjukkan bahwa Responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 14 orang atau sebesar 30% dan Responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 32 orang atau sebesar 70%. Berdasarkan responden menurut jenis kelamin, maka responden perempuan yang mayoritas menjawab kuesioner pada OPD yang berbentuk dinas Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



Grafik 1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Identitas Responden Berdasarkan Usia

Berikut ini adalah tabel identitas responden berdasarkan usia

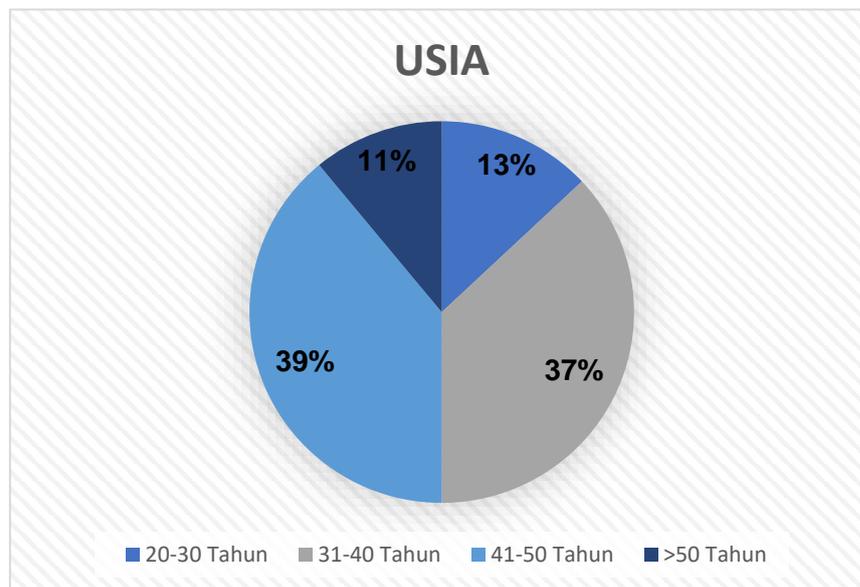
Tabel 4. Identitas Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	F	%
1	20-30 Tahun	6	13%
2	31-40 Tahun	17	37%
3	41-50 Tahun	18	39%
4	>50 Tahun	5	11%
Jumlah		46	100%

Sumber : Data primer diolah 2022

Berdasarkan pada tabel 4 menunjukkan bahwa responden dengan umur 20-30 sebanyak 6 orang (13%) responden dengan umur 31-40 sebanyak 17 orang (37%) responden dengan umur 41-50 sebanyak 18 (39%) dan responden dengan umur >50 sebanyak 5 orang (11%). Berdasarkan responden menurut usia maka responden terbanyak usia 41-50 tahun yang mayoritas menjawab kuesioner pada

OPD yang berbentuk dinas Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



Grafik 2. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

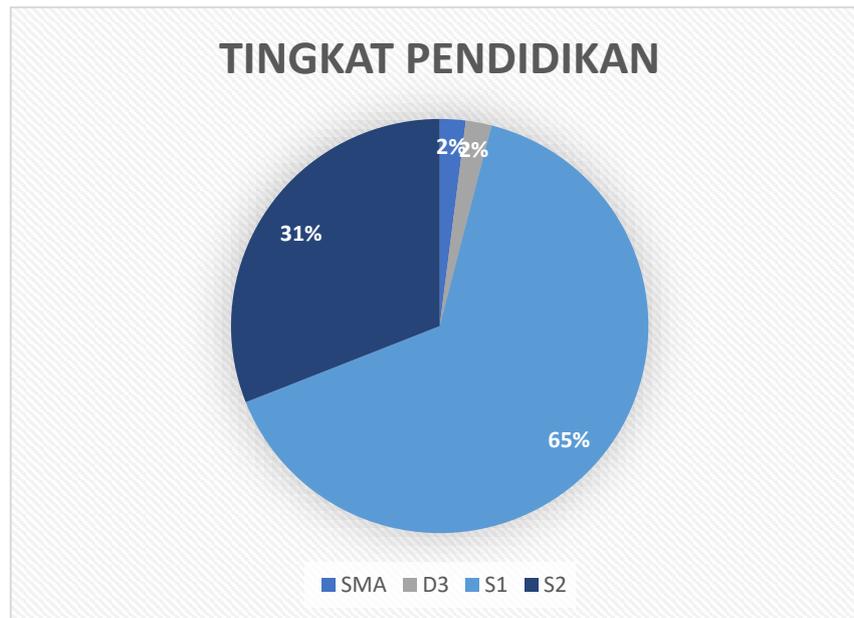
Berikut ini adalah tabel identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 5. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Usia	F	%
1	SMA	1	2%
2	D3	1	2%
3	S1	30	65%
4	S2	14	31%
Jumlah		46	100%

Sumber : Data primer diolah 2022

Berdasarkan pada tabel 5 menunjukkan bahwa Responden dengan pendidikan SMA sebanyak 1 Orang (2%), responden dengan pendidikan D3 sebanyak 1 orang (2%), Responden dengan Pendidikan S1 sebanyak 30 orang (65%), Responden dengan pendidikan S2 sebanyak 14 orang (31%) Berdasarkan responden menurut pendidikan terakhir, maka responden terbanyak berpendidikan S1 yang mayoritas menjawab kuesinoner pada OPD yang berbentuk dinas Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



Grafik 3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Identitas Responden berdasarkan Masa Kerja

Berikut ini adalah tabel identitas responden berdasarkan masa kerja:

Tabel 6. Identitas Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	Usia	F	%
1	1-10 Tahun	30	65%
2	11-20 Tahun	15	33%
3	>20 Tahun	1	2%
Jumlah		46	100%

Sumber : Data primer diolah 2022

Berdasarkan pada tabel 6 menunjukkan bahwa responden dengan masa kerja di bawah 1-10 tahun sebanyak 30 orang (65%), masa kerja 10-20 tahun sebanyak 15 orang (33%), masa kerja di atas 20 tahun sebanyak 1 orang (2%). Berdasarkan responden menurut masa kerja maka responden terbanyak masa kerja 1-10 tahun yang mayoritas menjawab kuesioner pada OPD yang berbentuk dinas Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :



Grafik 4 Identitas Responden Berdasarkan Masa Kerja

PEMBAHASAN

Metode Analisis Data Penelitian

Statistik Deskriptif

Deskriptif data penelitian ini dapat dilihat dari rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum dan nilai standar deviasi. Untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian digunakan tabel statistik. Berikut ini adalah tabel hasil uji analisis statistik deskriptif.

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
				Statistic	Std. Error	
SAKD	46	4.00	5.00	4.2246	.04951	.33578
SPI	46	3.70	5.00	4.2870	.06143	.41666
KKP	46	3.78	5.00	4.1975	.05061	.34328
Valid N (listwise)	46					

Sumber : Output SPSS 26 data primer diolah 2022

Berdasarkan data pada tabel 7 menunjukkan jumlah N sebanyak 46 responden. Hasil analisis statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS 26.0 menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah (X1) memiliki nilai minimum sebesar 4,00 yang berarti persepsi rata-rata tanggapan responden sebesar 4,00 nilai maximum sebesar 5,00 yang berarti persepsi rata-rata tanggapan responden sebesar 5,00. Nilai Mean sebesar 4,2246 dan nilai standar deviasi

sebesar 0,33578. Nilai Mean lebih besar dari nilai standar deviasi menunjukkan hasil statistik deskriptif data variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1) adalah baik

Hasil analisis statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS 26.0 menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal (X2) memiliki nilai minimum sebesar 3,70 yang berarti persepsi rata-rata tanggapan responden sebesar 3,70. nilai maximum sebesar 5,00 yang berarti persepsi rata-rata tanggapan responden sebesar 5,00. Nilai Mean sebesar 4,2870 dan nilai standar deviasi sebesar 0,41666 Nilai Mean lebih besar dari standar deviasi menunjukkan hasil statistik deskriptif data variabel sistem pengendalian interna (X2) adalah baik

Hasil analisis statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS 26.0 menunjukkan kinerja keuangan pemerintah (Y) memiliki nilai minimum sebesar 3,78 yang berarti persepsi rata-rata tanggapan responden sebesar 3,78. nilai maximum sebesar 5,00 yang berarti persepsi rata-rata tanggapan responden sebesar 5,00 Nilai Mean sebesar 4,1975 dan nilai standar deviasi sebesar 0,34328 Nilai Mean lebih besar dari standar deviasi menunjukkan hasil statistik deskriptif data variabel kinerja keuangan pemerintah (Y) adalah baik.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar.

Berdasarkan Hasil uji hipotesis pertama menyatakan bahwa H_a diterima yang berarti Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah kota Makassar. Dapat disimpulkan jika sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berjalan dengan efisien dan efektif maka akan menunjukkan kinerja keuangan pemerintah kota Makasar yang baik. Hasil penelitian ini Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang diganti dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip sistem pengendalian internal.

Berdasarkan hasil deskripsi tanggapan responden atas variabel kinerja keuangan pemerintah dari 25 organisasi perangkat daerah yang berbentuk dinas di pemerintah kota Makassar rata-rata persepsi responden menunjukkan nilai variabel kinerja keuangan pemerintah baik sehingga menunjukkan hasil penelitian uji simultan berpengaruh positif signifikan. Hal ini sesuai dengan IHSP semester I tahun 2021 opini BPK atas LKPD pemerintah kota Makassar untuk tahun Anggaran 2020 dengan status wajar dengan pengecualian (WDP). Dikarenakan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah masih kurang baik, dan pengawasan sistem pengendalian internal serta ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu jika penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diterapkan dengan baik dan pengawasan sistem pengendalian

internal juga berjalan secara efisien dan efektif di setiap organisasi perangkat daerah pemerintah kota Makassar maka dalam proses akuntansi akan menghasilkan keandalan laporan keuangan pemerintah kota Makassar yang menunjukkan kinerja keuangan pemerintah kota Makassar yang baik dengan status wajar tanpa pengecualian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nuraini Ismail dkk (2021) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Makassar

Hasil uji hipotesis kedua menyatakan bahwa H_{a2} diterima yang berarti sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Makassar. Dapat disimpulkan jika penerapan sistem akuntansi keuangan daerah baik maka akan menunjukkan kinerja keuangan pemerintah kota Makassar yang baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Mardiasmo dalam Almada (2013) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah akan tercapai dengan dilaksanakannya sistem akuntansi keuangan daerah yang menimbulkan dukungan yang kuat terhadap kinerja keuangan pemerintah yang dicapai.

Berdasarkan hasil deskripsi tanggapan responden atas variabel sistem akuntansi keuangan daerah dari 25 organisasi perangkat daerah di pemerintah kota Makassar rata-rata persepsi responden menunjukkan variabel sistem akuntansi keuangan daerah baik sehingga menunjukkan hasil penelitian berpengaruh positif signifikan. Hal ini sesuai dengan IHSP semester I tahun 2021 untuk anggaran 2020 yang menyatakan bahwa LKPD yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dikarenakan Ketekoran/kekurangan kas pada Bendahara daerah pengeluaran belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah. Oleh karena itu lemahnya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat menyebabkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang relevan dan Andal untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik maka akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang andal dan relevan, yang akan menunjukkan kinerja keuangan pemerintah kota Makassar yang baik.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuraini Ismail dkk (2021), Gustina (2021), dan lailatur Rohmah (2020) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Makassar

Hasil uji hipotesis ketiga menyatakan bahwa H_{a3} diterima yang berarti Sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Makassar. Dapat disimpulkan jika sistem pengendalian internal berjalan dengan efektif maka akan menunjukkan kinerja keuangan pemerintah kota Makassar. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori mulyadi (2001:163) yang menyatakan bahwa unsur-unsur sistem pengendalian internal harus dimasukkan sebagai unsur yang melekat dalam berbagai sistem akuntansi yang akan dirancang.

Berdasarkan hasil tanggapan responden atas variabel sistem pengendalian internal dari 25 organisasi perangkat daerah yang berbentuk dinas di pemerintah kota Makassar rata-rata persepsi responden menunjukkan variabel sistem pengendalian internal baik sehingga menunjukkan hasil penelitian berpengaruh positif signifikan. Hal ini sesuai dengan IHSP semester I tahun 2021 untuk anggaran 2020 yang menyatakan bahwa permasalahan sistem pengendalian internal atas LKPD dikarenakan Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat dan Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu dengan Adanya penerapan sistem pengendalian internal pemerintah akan memberikan arah dan kontrol yang baik bahwa standar akuntansi pemerintah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah bisa tercapai sesuai yang dipersyaratkan yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Jika penerapan unsur-unsur sistem pengendalian internal berjalan efektif dalam proses akuntansi maka akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas yang menunjukkan kinerja keuangan pemerintah kota Makassar yang baik.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nuraini Ismail dkk (2021), lailatur Rohmah (2020) dan ayang darmawan dkk (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas hasil penelitian, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan bahwa :

1. Sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Makassar
2. Sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Makassar.
3. Sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Makassar.

Saran

Adapun saran yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya untuk memperluas atau menambah Objek Penelitian untuk dijadikan sampel tidak hanya OPD yang berbentuk dinas saja tetapi OPD yang berbentuk badan, sehingga hasil yang di peroleh lebih maksimal dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar lebih meningkatkan kualitas Penerapan Sistem Akuntansi keuangan daerah agar hasil pelaporan Pemerintah Kota Makassar yang menunjukkan kinerja keuangan pemerintah kota Makassar yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar lebih ditingkatkan lagi sistem Pengendalian Internal yang baik bagi pegawai atau masyarakat agar pengelolaan keuangan daerah tetap handal dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Empat)*. PT.Salemba Empat.
- Almanda Primadona. (2013). *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Kota Bandung)*. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.
- Ardilla, I., & Putri, A. A. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 78–85.
- Arsyati Dkk. (2008). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Pnbp Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi Pada Universitas Syiah Kuala*. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* 1(1), 29–49.
- Ayang Darmawan & Darwanis. (2018). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi Sumberdaya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpa Provinsi Aceh*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. 3(1), 9-19.
- Desiana Anugrah Budiawan Dan Budi S. Purnomo. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 276–288.
- Epifani Yusta Meyendri Bong. (2021). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Manggarai Timur*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Erlina dan Rasdianto. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Gustina, I. R. A. (2021). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 10(1), 56–64.
- Hendry Jaya. (2018). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal*. *Akuntansi Ekonomi* , Universitas Riau Kepulauan Indonesia, 12.

- Hery. (2014). *Akuntansi Dasar 1 Dan 2*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Imam Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang: Universitas Semarang.
- Indra Bastian. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- (2017). *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Lailatur Rohmah, Noor Shodiq Askandar, Arista Fauzi Kartika Sari. (2020). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang*. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. 9(5).
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT.Salemba Empat.
- Neo Agustina Dan Ahmad Saifanur. (2019). *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara*. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*. 5(11), 85–98.
- Novtania Mokoginta Dkk. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. *Jurnal Riset Akuntansi*. 12(2), 874–890.
- Nuraini Ismail Dkk. (2021). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pengendalian Internal, Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo*. *Jurnal Binakwa*. 15(12), 5889–5896.
- Nuramalia Hasanah Dan Achmad Fauzi. (2018). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta :In Media.
- Satria, C. (2019). *Pengaruh Pengendalian Intern Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Palembang*. *Jurnal Ecoment Global*. 4, 125–135.

Sugiyono. (2019). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Triyani, Z., & Tubarad. (2018). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 23(1), 11–30.

Wiratna Sujarweni. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Baru.

Yakub. (2012). *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengukuran Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia No.9 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.

<https://www.bpk.go.id/ihps> diakses pada tanggal 24 Januari 2022

<https://www.makassar.go.id> diakses pada tanggal 24 Januari 2022